BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan memuat penjabaran masing-masing misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan *(policy planning)* yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management).* Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Selanjutnya di dalam penyusunan arah kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025. Untuk lebih detail terkait strategi dan arah kebijakan lihat pada tabel berikut.

6.1 Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai iman dan kepercayaan masing-masing. Terwujudnya sikap dan perilaku rukun, toleransi, dan gotong-royong.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas wadah pembinaan masyarakat berbasis agama. Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama untuk membina masyarakat. Memberikan dukungan operasional lembaga sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat.	Mengoptimalkan peran lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
	Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.	Mengintegrasikan semua tokoh dan lembaga sosial keagamaan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan daerah.	Mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.
	Terminimalisirnya berbagai isu sara yang berpotensi menimbulkan konflik, dan mencari solusi secara damai jika terjadi konflik agama.	Membentuk dan merevitalisasi FKUB. Mendukung FKUB dalam melaksanakan fungsinya. Mengembangkan FKUB untuk juga membina kerukunan antar umat beda agama.	Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
	Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dicapai.	Mengedepankan FKUB dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama.	Memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama.

2. Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang sesuai dengan budaya Indonesia agar tetap menjiwai Bangsa Indonesia.	Terwujudnya generasi muda yang memegang prinsip nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.	Mengidentifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) yang harus dilestarikan. Menginternalisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal (adat) melalui lembaga formal maupun informal masyarakat. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai tradisional, kearifan lokal, dan keagamaan.	Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu, terutama pada kalangan generasi muda sebagai upaya peningkatan peran sertanya dalam pembangunan. Mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Batu yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.2 Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 6.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pemerintah Kota Batu sebagai organisasi birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance).	Terwujudnya kepemimpinan yang mencerminkan kapasitas untuk mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah, serta kapasitas membangun kepercayaan dan langkah-langkah nyata.sesuai dengan nilai yang disepakati.	Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan. Memberi motivasi, inspirasi, mendukung pegawai, dan menjadi panutan. Mengelola hubungan dengan stakeholder.	Mengembangkan kepemimpinan yang bisa berdiri didepan memberi teladan, ditengah membangun semangat dan motivasi kerja, dan dibelakang memberi kekuatan kerja.
	Terwujudnya perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil kerja dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Mengembangkan, mengkaji, serta memperbarui rencana strategis dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya. Melaksanakan rencana strategis. Merencanakan, melaksanakan, & mengkaji modernisasi dan inovasi.	Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah partisiparif, transparan, dan akuntabel menuju modernisasi dan inovasi demi kepentingan bersama.
	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mencapai tujuan organisasi.	Merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas SDM aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana strategis dan roadmap reformasi birokrasi. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggunakan kompetensi pegawai, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Melibatkan staf dengan dialog dan pemberdayaan.	Mengembangkan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki daya untuk memberdayakan aparatur-aparaturnya dan lebih berdayaguna untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pembangunan daerah.

	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Pengelolaan keuangan. Pengelolaan informasi dan pengetahuan. Pengelolaan teknologi. Pengelolaan fasilitas.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu memberdayakan kemampuan keuangan, informasi, pengetahuan, dan fasilitas yang dimiliki daerah dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi komunikasi. Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dan penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Efisiensi dan efektivtas pendanaan pembangunan melalui efektivitas dan efisiensi belanja APBD.
	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu merencanakan dan mengelola kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendukung rencana strategis dan roadmap, serta kelancaran proses kerja.	Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan pihak swasta. Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan kabupaten kota dalam provinsi dan luar provinsi. Perencanaan dan pengelolaan kemitraan dengan provinsi dan pusat.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bijaksana dalam memberdayakan para pemangku kepentingan dalam sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas pendanaan pembangunan yang meliputi penguatan dan perluasan kemitraan, pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pendanaan pembangunan daerah dengan pola *cost sharing* antara pemerintah (provinsi dan kota).
	Terwujudnya satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengidentifikasi, mengelola, meningkatkan, dan membangun proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung untuk mengimplementasikan dan mendukung rencana strategis dan roadmap organisasi.	Mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memperbaiki proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan. Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/ pengguna layanan.	Mengembangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai sistem proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, yang dapat meningkatkan hasil capaian dalam tugas pelayanan dan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan.	Mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diperlukan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia pelaksana, kebijakan terkait pelimpahan kewenangan perijinan kepada camat, dan alokasi anggaran bagi kecamatan. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PATEN yang meliputi penyusunan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan, penyusunan tata cara pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pelaporan, pemberian sanksi dan penghargaan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN terkait ketersediaan fasilitas, proses pelaksanaan, dan penggunaan anggaran.	Optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan kebutuhan serta tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.3 Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Tabel 6.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pertanian organik berwawasan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.	Terwujudnya sistem bertani organik. Terwujudnya perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik yang berwawasan kesehatan. Terwujudnya produk pertanian organik.	Menyusun masterplan pertanian go organik. Menetapkan kawasan pertanian organik beserta jenis tanaman sebagai pilot project. Memenuhi berbagai kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik (bibit unggul, obat-obatan, pupuk, dan teknologi organik). Melakukan pembinaan kepada petani dan lembaga petani mengenai keunggulan pertanian organik dan keahlian pertanian organik berwawasan kesehatan.	Pengembangan pertanian organik dalam rangka menghasilkan produk unggulan yang berkualitas.
	Terwujudnya kemantapan proses pengembangan pertanian organik. Terwujudnya diversifikasi pertanian organik.	Meningkatkan intensitas pengembangan pilot project budidaya pertanian organik. Menganekaragamkan jenis tanaman yang diproses secara organik.	Memantapkan proses pengembangan pertanian organik, dan menciptakan diversifikasi produk unggulan berkualitas.
	Terwujudnya pasar induk agribisnis.	Membangun pusat perdagangan hasil pertanian organik maupun non organik dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Mendukung pemanfaatan pusat perdagangan ini agar dapat berfungsi optimal.	Pembangunan pasar induk agribisnis.
	Terwujudnya penguatan agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	Mengarahkan semua pelaku agrobisnis untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dalam rangka merebut pasar nasional maupun internasional. Menggencarkan promosi hasil pertanian ke dalam	Penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.

		pasar nasional dan internasional.	
	Terwujudnya penguatan aspek pasar.	Memantau dan menjaga stabilitas mekanisme pasar agar tidak terganggu oleh tindakan-tindakan spekulan yang dapat merusak akses pasar. Mengadakan tindakan penanggulangan lonjakan harga.	Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.
	Terwujudnya sistem informasi produksi, distribusi, dan pasar komoditas pertanian.	Mengembangkan sarana informasi untuk menginformasikan berbagai informasi pasar komoditas pertanian.	Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar untuk produk organik.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.	Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses penyuluhan pertanian. Mengembangkan keahlian SDM penyuluh pertanian.	Pengembangan SDM penyuluh pertanian dan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan pertanian organik.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.4 Misi 4 : Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Tabel 6.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 4 : Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata internasional.	Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional “Batu Destination” berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kota yang berwawasan internasional dalam peraturan daerah. Menyusun strategi dan grand desain penyiapan sistem dan struktur sosial dalam mendukung kepariwisataan internasional. Menyusun kebijakan kepariwisataan dalam bentuk peraturan daerah. Memfasilitasi berdirinya Daerah Tujuan Wisata unggulan baru “ASEAN CULTURE PARK” yang berwawasan internasional. Mengembangkan Kota Batu secara makro menuju perwujudan *Batu Destination.* Mengembangkan desa/kelurahan menjadi “desa wisata” berdasarkan pada potensi masing-masing wilayah. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan “Batu Destination”. Menyiapkan infrastruktur kepariwisataan internasional.	Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
	Terwujudnya penguatan citra industri pariwisata Kota Batu dalam industri pariwisata internasional.	Menggelar event pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata secara rutin dalam skala regional, nasional, maupun internasional sebagai sajian	Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

		wisata. Memantau sajian wisata Kota Batu supaya tetap mempertahankan basis budaya lokal dan agrowisata. Melakukan tindakan tertentu terhadap penyelewengan yang terjadi. Mengupayakan Kota Batu masuk dalam “international tourism directory”, “World Federation of Tourist Guide Association”, dan “World Tourism Organization.” Memenuhi standar sarana prasarana wisata internasional.	
	Tersebarluaskannya promosi keunggulan dan kenyamanan wisata Kota Batu.	Mempromosikan semua obyek kepariwisataan Kota Batu secara nasional dan internasional melalui media informasi yang efektif. Mengembangkan promosi langsung melalui Location Bassed Advertising. Memperkuat kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah berbatasan.	Promosi pariwisata daerah dan pemantapan city branding Batu sebagai Kota Wisata di tingkat nasional dan internasional. Memperkuat kerjasama bidang pariwisata antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah.
	Tersedianya SDM kepariwisataan berkompentensi dan profesional.	Mendukung sekolah kejuruan bidang kepariwisataan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja kepariwisataan. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional. Meningkatkan profesionalitas pekerja sektor pariwisata melalui pendidikan di Balai Latihan Kerja.	Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten dan profesional.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.5 Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Tabel 6.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 5 : Optimalisasi Investasi Daerah

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengoptimalkan investasi daerah ke arah peningkatan kesejahtaraan masyarakat.	Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada. Masuknya investor baru ke Kota Batu. Berkembangnya kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri. Terciptanya peluang kerja padat karya bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan. Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.	Menyediakan informasi yang berhubungan dengan bidang usaha unggulan daerah dan potensi sumber daya unggulan daerah. Menyusun sistem perijinan dan penataan lingkungan usaha yang kondusif bagi penciptaan kepastian investasi. Memfasilitasi kerjasama investasi dengan pihak swasta. Mempromosikan semua potensi keunggulan wisata. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus.	Mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal. Kerjasama pemerintah kota dengan swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan kota.
	Tersusunnya kebijakan investasi daerah.	Kajian regulasi investasi agar dapat lebih mengakomodasi ketertarikan investor untuk tetap atau hendak berinvestasi. Memperluas jaringan kerjasama investasi dengan daerah lain baik di Indonesia maupun negara lain. Membentuk konsorsium investasi daerah bersama dengan daerah lain.	Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (sister city).
2. Membentuk keterpaduan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam proses kerja.	Meningkatnya kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja. Meningkatkan kurikulum, sarana, dan prasarana berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	Mendirikan Balai Latihan Kerja Pertanian dan Pariwisata. Menyusun kurikulum pelatihan tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada, berbasis potensi lokal yang memiliki keunggulan, dan aspek kewirausahaan.	Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal

		Melatih calon tenaga kerja dengan kurikulum baru yang telah ditetapkan agar memiliki kompetensi dan daya saing sesuai kebutuhan pasar. Meningkatkan sarana prasarana pelatihan yang memadai. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pelatih.	serta kewirausahaan.
	Terbentuknya hubungan yang selaras antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Meningkatnya produktivitas dan kualitas kerja. Meningkatnya kesejahteraan pekerja.	Membangun peluang-peluang kerja padat karya yang dikelola secara produktif dan professional. Menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai keberadaan dan hubungan antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja. Membentuk forum kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan asosiasi pekerja. Membangun kesepakatan bersama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.	Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
	Terjaganya keselarasan kerja yang telah dibangun oleh pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.	Memantau keselarasan kerja yang telah terbentuk dengan berpedoman kepada kesepakatan bersama dan aturan yang berlaku.	Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.6 Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Tabel 6.6.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 6 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Membentuk sumber daya manusia pendidik yang berkompeten dan beretika.	Meningkatnya kompetensi pendidik di setiap jenjang pendidikan.	Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Memfasilitasi uji kompetensi terhadap tenaga pendidik. Melaksanakan sertifikasi pendidik. Mengembangkan pendataan dan pemetaan pendidik. Mengembangkan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik.	Mendorong dan memacu pendidik untuk mau dan dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik agar dapat mengikuti laju perkembangan keilmuan sesuai dengan bidang studi yang diampu.
	Meningkatnya etika dari para pendidik.	Mengembangkan dan sosialisasi kode etik terhadap pendidik. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap aktifitas pendidik proses pendidikan.	Mendorong pendidik untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai pendidik secara profesional dan beretika.
2. Mewujudkan lembaga pendidikan yang benar-benar mengedepankan upaya membentuk anak didik yang berkualitas secara keilmuan, bermoral dan berakhlak mulia.	Terwujudnya lembaga pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan dasar dengan jumlah siswa pendidikan dasar. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb)	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal di tingkat pendidikan dasar sembilan tahun.

		Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	
	Terwujudnya lembaga pendidikan menengah yang unggul.	Mengupayakan keterpenuhan rasio jumlah lembaga lembaga pendidikan menengah. Mengupayakan keterpenuhan standarisasi guru baik secara kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya. Mengupayakan keterpenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan (ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, meja, kursi, peralatan praktikum, buku, fasilitas ekstrakurikuler, dsb) Mengembangkan metode belajar mengajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan teknologi informasi, dan keunggulan lokal.	Memenuhi ketercapaian sumber daya manusia maupun sumber daya material yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional maupun keunggulan lokal di tingkat pendidikan dasar menengah.
	Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang unggul yang mendukung potensi dan keunggulan daerah. Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan.	Mengembangkan kurikulum khusus (sesuai potensi dan keunggulan Kota Batu) untuk dimasukkan dalam pendidikan sekolah kejuruan di Kota Batu.	Mengembangkan pendidikan kejuruan yang lebih mengarahkan peserta didik untuk lebih siap mendukung sektor industri unggulan daerah Kota Batu.
	Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan yang handal.	Mengembangkan data dan informasi pendidikan yang terbarukan dan akurat baik dari sisi peserta didik dan masyarakat, maupun	Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang handal, memegang prinsip pelayanan, transparan, dan dapat

		pengelolaan pendidikan. Memantau pemanfaatan berbagai dana bantuan oleh sekolah. Melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam memantau pelaksanaan pendidikan. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja setiap lembaga pendidikan.	dipertanggungjawabkan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.7 Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 6.7.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualias, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.	Mengadakan berbagai kebutuhan obat yang diproyeksi akan dibutuhkan. Menyebar persediaan obat secara merata kepada seluruh instansi pelayanan kesehatan masyarakat.	Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. Memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.	
	Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan melalui Diklat, Magang, Lokakarya dll.	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Standarisasi pelayanan kesehatan dengan menyusun Protap, SOP, dll.	
	Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular & tidak menular. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lansia. Penyediaan tambahan makanan dan vitamin bagi masyarakat. Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat. Memantau kualitas makanan masyarakat.	

		Menyelenggarakan penjaminan kesehatan kepada masyarakat.	
	Meningkatnya kesehatan lingkungan.	Membina masyarakat untuk meningkatkan sanitasi keluarga. Membina masyarakat untuk tidak buang air besar secara sembarangan. Melakukan uji air.	
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya keluarga berencana.	Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana. Meningkatnya reproduksi sehat. Terwujudnya keluarga berencana sejahtera.	Meningkatkan peran PLKB dalam pencapaian Program Keluarga Berencana. Meningkatkan KIE-KESPRO kepada masyarakat. Meningkatkan peranan PKK di seluruh wilayah dalam mewujudkan keluarga sejahtera.	Pemantapan akses layanan keluarga berencana yang merata dan terjangkau; terutama bagi pasangan usia subur. Serta ditunjang dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia remaja. Pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil, dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.8 Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Tabel 6.8.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 8 : Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperlancar dan mendukung kinerja pemerintah, proses pembangunan kota, aktifitas perekonomian, dan segala aspek kehidupan masyarakat.	Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota.	Membangun gedung perkantoran pemerintah (block office).	Pengembangan infrastruktur wilayah, diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengoptimalkan sarana transportasi umum (angkutan dan terminal), serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah. Kerjasama antar daerah perbatasan dalam upaya pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan, infrastuktur transportasi, dan persampahan.
	Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri.	Membangun gedung sekolah SD Negeri dan SMA Negeri.	
	Terwujudnya infrastruktur kesehatan	Membangun gedung bank darah.	
	Terwujudnya infrastruktur kearsipan dan perpustakaan.	Membangun gedung depo arsip dan perpustakaan.	
	Terwujudnya infrastruktur keolahragaan.	Membangun Gedung Olahraga beserta fasilitasnya yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan event olahraga nasional.	
	Terwujudnya infrastruktur perdagangan.	Membangun gedung pasar induk Kota Batu.	
	Terwujudnya infrastruktur pertanian.	Membangun gedung pasar agrobisnis Kota Batu.	
	Terwujudnya infrastruktur koperasi dan UKM.	Membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).	
	Terwujudnya infrastruktur ketenagakerjaan.	Membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK).	
	Terwujudnya infrastruktur pariwisata.	Membangun sarana wisata kereta gantung. Membangun rest area. Membangun sarana wisata Drive In	
	Terwujudnya infrastruktur jalan.	Membangun jalan lingkar barat untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Membangun jalan lingkar utara untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Membangun jaringan jalan dan jembatan baru.	
	Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas.	Meningkatkan fasilitas jalan raya.	

	Meningkatnya infrastruktur sanitasi lingkungan permukiman.	Mengembangkan infrastruktur dan pengelolaan penyediaan air bersih. Mengembangkan infrastruktur pengolahan air limbah komunal dan fasilitas penyehatan lingkungan permukiman. Mengembangkan infrastruktur drainase lingkungan. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan persampahan.	

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.9 Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 6.9.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 9 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atas berbagai kepentingan publik masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa. Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan desa yang mendukung tugas dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah kepada masyarakat.	Membina aparatur pemerintah desa dengan sistem kepegawaian yang terstandar. Menyebarkan penempatan PNS dalam pemerintahan desa. Pemberian insentif kepada aparatur desa non PNS.	Penguatan otonomi pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan.
	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang proses kerja pelayanan pemerintahan desa.	Memenuhi sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan sarana teknologi informasi komunikasi.	
	Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah daerah.	Menyelenggarakan forum komunikasi antara pemerintah kota dengan pemerintah desa. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, serta pengelolaan aset desa.	
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa.	Menyusun pedoman standar pelayanan. Mensosialisasi pedoman standar pelayanan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman standar pelayanan untuk meningkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan desa.	

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.10 Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Tabel 6.10.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 10 : Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berpolitik bertanggung-jawab sesuai koridor hukum yang berlaku dengan senantiasa berpegang pada semangat kebangsaan dan sikap saling menghormati.	Meningkatnya iklim demokrasi. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik, dan keagamanaan masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan demokratisasi. Meningkatnya peran dan fungsi perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik. Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih tertata.	Melaksanakan musrenbang baik di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, maupun kota sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Memberikan kebebasan dan hak untuk ikut berpolitik bagi semua elemen masyarakat termasuk perempuan dan pemuda. Menyelenggarakan pendidikan politik dan semangat kebangsaan secara masiv terhadap masyarakat. Mengembangkan kapasitas dan profesionalisme lembaga demokrasi lokal. *Mendorong partai politik untuk membina kader-kadernya untuk mewujudkan kemandirian partai politik.* Mensinergikan aktifitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam satu kerangka tujuan yang didasari penguatan etika organisasi. Mendukung penyelenggarakan pemilihan legislatif, presiden, dan DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, berbudaya, dan damai.	Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan kepemudaan dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani *(civil society)*, pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penataan hubungan eksekutif dan legislatif.
2. Mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat.	Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum.	Meningkatkan peran satpol PP dalam menertibkan pelaksanaan perundang-undangan daerah dengan cara-cara yang berorientasi pada pelayanan prima.	Penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan,

		Melaksanakan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam mendukung penegakan perundang-undangan daerah.	memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
	Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan.	Membentuk dan menguatkan peran sistem keamanan lingkungan (siskamling). Mensinergikan aktifitas siskamling dengan lembaga penegak hukum. Mengadakan pos-pos jaga di lingkungan masyarakat.	Pembangunan bidang keamanan lingkungan masyarakat diprioritaskan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.
	Meningkatnya stabilitas dan keamanan lingkungan.	Mengembangkan sistem ketahanan sosial masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan dari luar. Melakukan upaya preventif terhadap berbagai tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan baik oleh lembaga siskamling maupun aparat penegak hukum. Membina masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui berbagai forum dalam masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.	Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

6.11 Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Tabel 6.11.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu
Misi 11 : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui usaha kecil menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas produksi melalui UKM.	Melakukan pembinaan terhadap UKM yang telah ada dalam masyarakat. Memfasilitasi UKM dalam hal sarana, permodalan, dan pemasaran.	Mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan UKM yang ada di tengah masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produksi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Meningkatnya kemampuan UKM dalam mengembangkan usahanya.	Menyelenggarakan pelatihan terhadap para pelaku UKM terkait dengan berbagai pengetahuan pengembangan usaha. Memfasilitasi UKM dengan penerapan teknologi tepat guna. Memfasilitasi berbagai upaya kerjasama dan kemitraan usaha. Memfasilitasi upaya perlindungan hukum terhadap hasil produksi UKM.	Mendorong kewirausahaan dan keunggulan kompetitif hasil usaha dalam upaya sebagai daya dorong keberlanjutan dan keberlangsungan UKM. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi Jawa Timur dalam peningkatan perekonomian daerah.
	Meningkatnya kualitas upaya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur koperasi dan UKM.	Memberikan pelatihan kerja dengan materi keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi pemberdayakan perempuan yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor industri. Memfasilitasi inkubator usaha-usaha ekonomi oleh perempuan dan kelompok perempuan.	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi.

2. Mengentaskan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dari keterpurukan sosial melalui sektor UKM.	Meningkatnya kemampuan produktif (skill) masyarakat PMKS. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan bagi masyarakat PMKS. Meningkatnya keberdayaan masyarakat PMKS minimal dalam memenuhi 3 kebutuhan pokok.	Mengidentifikasi perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat PMKS. Memberikan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh sektor UKM. Memfasilitasi PMKS yang telah terlatih agar dapat masuk dalam sektor UKM.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Menengah Kecil (KUMKM) dalam mendorong keberdayaan UKM.	Terwujudnya KUMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.	Menguatkan peran Koperasi Usaha Menengah Kecil Masyarakat terhadap UKM-UKM yang ada di tengah masyarakat. Memfasilitasi kinerja KUMKM dalam menjalankan fungsinya baik ke dalam (kepada UKM) maupun ke luar (perluasan jaringan kerjasama). Mengembangkan jaringan kerjasama antar koperasi.	Optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM, yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna; untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
	Meningkatnya kualitas dan kehandalan KUMKM yang berhasil guna dan berdaya guna.	Memperbaiki sistem pengelolaan KUMKM untuk menghasilkan kinerja dan hasil kerja yang produktif, efisien, dan efektif. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola KUMKM.	Peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.
	Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.	Mengembangkan inkubator bisnis padat karya. Mengikutsertakan UMKM dalam pameran lokal, regional, nasional, dan internasional. Memfasilitasi pengembangan sarana pemasaran.	Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kota Batu. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan di lingkup regional dan nasional.
4. Meningkatkan peran semua industri kecil dan menengah yang ada dalam masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Batu.	Meningkatnya konsolidasi dan jejaring semua sektor industri di Kota Batu untuk mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata.	Menyusun grand desain pengembangan industri hulu hilir dalam mendukung agrobisnis pertanian organik dan pariwisata. Memfasilitasi konsolidasi dan networking dari semua pelaku industri kecil menengah di Kota Batu, dari industri hulu sampai hilir, industri pariwisata, industri pertanian, industri	Bidang industri diprioritaskan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring *(networking)*, melalui: peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Kota Batu

		perikanan, industri kerajinan, industri perhotelan, dll. Memfasilitasi pemenuhan modal dan sumber daya bagi industri kecil dan menengah.	sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi lembaga keuangan mikro baik bank dan non bank yang diarahkan untuk mampu memberikan peran intermediasi di sektor riil lokal pedesaan maupun kelompok marginal perkotaan.
	Meningkatnya kemampuan dan daya saing industri kecil.	Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Memfasilitasi pengembangan industri kecil agar menjadi tangguh. Mengembangkan pembinaan strategi industri melalui pembentukan sentra dan cluster industri.	Penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.